



Kementerian Kelautan dan Perikanan

**Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil kelautan dan Perikanan Merak
Propinsi Banten**

Tahun 2025

LAPORAN KEUANGAN

**Untuk Periode yang berakhir
31 Desember 2025 (Audited)**

Jl. Raya Tol Merak km.01 No.01 Pelabuhan Penyeberangan

Merak, Kota Cilegon – BANTEN 42436-42438

Telp. (0254) 573286



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak adalah salah satu entitas pelaporan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mapu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Cilegon, Mei 2026
Kepala,

Promo



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li
Pernyataan Tanggung Jawab	lii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	53
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	63
F. Pengungkapan Penting Lainnya	68
VI. Lampiran dan Daftar	IV

**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK**
**JL. RAYA TOL MERAK KM.01 NO.01 PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK -
BANTEN**
TELEPON 0254 573286, 573309, FAXIMILE 0254573286

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Cilegon, Mei 2026

P.196910311989031002



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 355.796.132,- atau mencapai 10,85 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 3.279.935.000,-. Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 8.907.722.929,- atau mencapai 93,68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 9.509.119.000,-.

Stasiun PPMHKP Merak pada tahun 2025 mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.509.119.000,- yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp. 9.329.555.000,- dan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 179.564.000,-. Jumlah anggaran dan rincian pelaksanaan anggaran tercantum dalam daftar isian pelaksanaan kegiatan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-032.13.2.649688/2025 R tanggal 23 November 2024.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 12.723.609.159,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 266.070.513,-

Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 12.457.538.646,- dan Aset Lainnya (neto) Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 15.363.783,- dan Rp. 12.708.245.376,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 349.010.500,-, sedangkan jumlah Beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 9.194.132.267,-, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (8.845.121.767). Pada Kegiatan Non Operasional terdapat Surplus pelepasan Aset Non Lancar adalah sebesar Rp. 6.785.632,- dan kegiatan non operasional lainnya yaitu sebesar Rp. (129.813.200) sehingga dari Kegiatan Non Operasional terdapat defisit sebesar Rp. (123.027.568) dan pada Pos Luar Biasa adalah Rp. 0. Sehingga nilai entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (8.968.149.335).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.10.407.631.093,-, ditambah Defisit-LO sebesar Rp. (8.968.149.335) dan Koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp. (146.626.714), lain –lain Rp.0 kemudian ditambah dengan transaksi antar entitas senilai Rp. 11.415.390.332,- sehingga menghasilkan kenaikan ekuitas senilai Rp. 2.300.614.283,- dan Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 12.708.245.376,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,

dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU

HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 Ds2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.279.935.000	355.796.132	10,85	1.152.657.607
JUMLAH PENDAPATAN		3.279.935.000	355.796.132	10,85	1.152.657.607
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	5.613.834.000	5.267.729.995	93,83	1.875.929.592
Belanja Barang	B.4	3.895.285.000	3.639.992.934	93,45	1.936.162.940
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		9.509.119.000	8.907.722.929	93,68	3.812.092.532

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
N E R A C A
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024

_(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	103.008	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.7	(515)	-
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	C.9	102.493	-
<i>Belanja dibayar dimuka (Prepaid)</i>	C.8	90.500.000	-
Persediaan	C.10	175.468.020	40.236.899
Jumlah Aset Lancar		266.070.513	40.236.899
ASET TETAP			
Tanah	C.14	8.330.878.900	8.330.878.900
Peralatan dan Mesin	C.15	7.885.558.401	4.354.849.636
Gedung dan Bangunan	C.16	4.566.738.645	1.881.671.150
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	30.500.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	34.374.000	24.374.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(8.360.011.300)	(4.176.765.442)
JUMLAH ASET TETAP		12.457.538.646	10.445.508.244
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	-	18.150.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	(18.150.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		12.723.609.159	10.485.745.143
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	15.363.783	78.114.050
Utang yang belum ditagihkan	C.25	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15.363.783	78.114.050
JUMLAH KEWAJIBAN		15.363.783	78.114.050
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	12.708.245.376	10.407.631.093
JUMLAH EKUITAS		12.708.245.376	10.407.631.093
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.723.609.159	10.485.745.143

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Pendapatan PNPB Lainnya		349.010.500	1.152.075.000
JUMLAH PENDAPATAN		349.010.500	1.152.075.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.198.629.937	1.944.926.642
Beban Persediaan	D.3	254.892.202	47.405.335
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.624.680.947	1.371.934.490
Beban Pemeliharaan	D.5	686.488.367	290.782.350
Beban Perjalanan Dinas	D.6	110.806.700	231.823.650
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	318.633.599	285.476.874
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	515	-
JUMLAH BEBAN		9.194.132.267	4.172.349.341
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.845.121.767)	(3.020.274.341)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non lancar		6.785.632	(2.860.782)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		6.785.632	415.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	3.275.782
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(129.813.200)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		129.813.200	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(123.027.568)	(2.860.782)
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(8.968.149.335)	(3.023.135.123)
POS LUAR BIASA	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(8.968.149.335)	(3.023.135.123)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	10.407.631.093	10.796.613.095
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(8.968.149.335)	(3.023.135.123)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(146.626.714)	838
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	(146.626.714)	-
LAIN-LAIN	E.5	-	838
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	11.415.390.332	2.634.152.283
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	2.300.614.283	(388.982.002)
EKUITAS AKHIR	E.8	12.708.245.376	10.407.631.093

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Kantor Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak terletak di Jalan Raya Tol Merak KM.1 No.1 Pelabuhan Penyeberangan Merak. Dengan jumlah personil PNS Sebanyak 10 orang dan dibantu 8 orang ASN serta 3 orang tenaga kontrak. Jumlah PNS 10 orang terdiri dari 1 orang Kepala, 4 orang Ketua Tim Kerja (Katimja), 4 orang pegawai fungsional dan 1 orang staf Tata Usaha.

Salah satu misi pembangunan nasional atau Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini mencerminkan aspirasi bangsa untuk menjadi negara maju dengan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung tercapainya visi tersebut melalui perencanaan yang terintegrasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Untuk periode 2025-2029, visi KKP ditetapkan sebagai

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan (1) meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis; (2) swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan (3) hilirisasi komoditas.

Visi dan Misi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak adalah mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan sedangkan untuk mencapainya melalui misi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selaku unit kerja dari unit pelaksana teknis Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak mengacu pada visi dan misi organisasi yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Visi dan misi Stasiun PPMHKP Merak adalah sebagai berikut:

VISI

“Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu Aman dan Terpercaya”.

MISI

Misi yang diemban oleh BPPMHKP kepada Stasiun PPMHKP Merak untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu.

Dalam melaksanakan tugasnya Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- 2) Pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- 4) pelaksanaan administrasi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPPMHKP.

Tujuan

Tujuan Pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi BPPMHKP guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dengan cara melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan serta

menjamin mutu hasil perikanan nasional. Dengan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- 1) Memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya Manusia secara terintegrasi
- 2) Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
- 3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan
- 4) Memperluas akses pasar domestik dan internasional

Sasaran Strategis

Sasaran pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan langkah-langkah spesifik, konkret, dan terukur yang diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai oleh BPPMHKP. Sasaran BPPMHKP dijabarkan sebagai berikut: Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPMHKP menetapkan sasaran spesifik dan terukur dalam empat (4) sasaran program utama:

- a. Program Manajemen Mutu;
- b. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produksi Primer;
- c. Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pasca Panen;
- d. Program Dukungan Manajemen.

Strategi tersebut digunakan sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak dengan capaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS) 1 yaitu Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Sasaran Strategis (SS) 2 yaitu Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Konsisten sesuai Standar.
3. Sasaran Strategis (SS) 3 Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup BPPMHKP

Dari Tiga Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak pada rencana strategis tahun 2025 – 2029 dilaksanakan dan dicapai melalui pelaksanaan indikator kinerja utama (IKU) pada setiap sasaran strategis yang diprioritaskan yaitu:

1. Indikator Kinerja Utama (IK1) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)
2. Indikator Kinerja Utama (IK2) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)
3. Indikator Kinerja Utama (IK3) Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Lokasi)
4. Indikator Kinerja Utama (IK4) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)
5. Indikator Kinerja Utama (IK5) Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)
6. Indikator Kinerja Utama (IK6) Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)
7. Indikator Kinerja Utama (IK7) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)
8. Indikator Kinerja Utama (IK8) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)
9. Indikator Kinerja Utama (IK9) Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)
10. Indikator Kinerja Utama (IK10) Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)

11. Indikator Kinerja Utama (IK11) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Nilai)
12. Indikator Kinerja Utama (IK12) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)
13. Indikator Kinerja Utama (IK13) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)
14. Indikator Kinerja Utama (IK14) Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (%)
15. Indikator Kinerja Utama (IK15) Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun PPMHKP Merak (Indeks)

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tujuan arah kebijakan jangka menengah (RPJMN) 2020 – 2025 diarahkan untuk penataan kembali organisasi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merak terhadap tugas- tugas mutu hasil perikanan yang semula dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas menjadikan tugas dan fungsi karantina ikan memiliki kompleksitas pengujian bukan hanya terhadap pathogen terhadap kondisi budidaya perikanan namun juga terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, karenanya guna menyongsong integrasi tugas pokok dan fungsi ini Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan perlu menetapkan kerangka kerja sesuai tantangan dan kondisi terkini agar seluruh rencana pada program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat dilaksanakan secara selaras dan terintegrasi melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Arah Kebijakan dan Strategi BPPMHKP

Arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
4. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik

ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNB-PBPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNB berbasis digital.

Arah Kebijakan dan Strategi SPPMHKP Merak

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam menetapkan langkah – langkah berupa program dan diimplementasikan kedalam bentuk kegiatan dengan memanfaatkan peluang (keuntungan), dan meminimalkan risiko (kerugian) sehingga memperoleh output secara maksimal dan outcome yang optimal melalui penerapan strategi yang terintegrasi.

Sedangkan strategi yang digunakan dalam menetapkan program dan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi, arah dan

kebijakan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak sebagaimana visi dan misi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui langkah-langkah Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi:

1. Peningkatan dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:
 - a. Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat
 - b. Jumlah pengembangan Administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkup SPPMHKP
 - c. Jumlah Ketatalaksanaan informasi dan kehumasan
2. Pengembangan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:
 - a. Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
 - b. Unit Usaha Pengelola Ikan (UPI) yang menerapkan Cara Pengelolaan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - c. UPI yang menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOIB)
 - d. UPI yang menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOIB)
 - e. UPI yang menerapkan Cara Pembuatan Pakain Ikan yang Baik (CPPIB)
 - f. Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (Sertifikat)
 - g. Jumlah unit pengelolaan ikan yang memenuhi standar ekspor (Unit)
 - h. Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor

- i. Sertifikasi Penerapan sistem jaminan mutu (Sertifikat HACCP) di unit Pengelolaan Ikan
3. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:
 - a. Jumlah Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability (UPI)
 - b. Jumlah unit pelaksana teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 (Unit)
 - c. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 (Unit)
 - d. Jumlah Laboratorium yang konsisten dalam penerapan ISO 17025 (Unit)
 - e. Tenaga Fungsional Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu yang mengikuti uji kompetensi (Orang).

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

Target Kinerja

Target Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak berupa Indikator Kinerja Program sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome).

Indikator kinerja program direncanakan dan ditetapkan dalam rencana strategis juga merupakan akuntabilitas kerangka organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program, dalam hal ini Stasiun PPMHKP Merak telah menetapkan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam struktur manajemen kinerja yang secara akuntabilitas yang berkaitan dengan unit pelaksana teknis lingkup Badan PPMHKP.

Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan

bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kerangka pendanaan Unit Pelaksana Teknis Instansi Pemerintah tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 bahwa kerangka pendanaan program Pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan pada Badan PPMHKP dituangkan sebagaimana yang telah ditetapkan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan Menggunakan Aplikasi SAKTI dan MonSAKTI yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAKTI dan MonSAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, Serta Laporan BMN berupa informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Karantina diakui setelah semua proses tindakan karantina selesai dilaksanakan yaitu dengan diterbitkannya Health Certificate dan Kuitansi tagihan PNBK.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya

adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
 - Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup

objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan sampai dengan akhir tahun 2025 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 10 (sepuluh) kali yakni pengurangan pagu anggaran dikarenakan efisiensi dan revisi administrasi sehingga nilai pagu anggaran berubah pada akhir tahun 2025.

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN AKHIR
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	3.279.935.000	3.279.935.000
Jumlah Pendapatan	3.279.935.000	3.279.935.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.008.796.000	5.613.834.000
Belanja Barang	4.231.595.000	3.895.285.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	10.240.391.000	9.509.119.000

Realisasi

*Pendapatan Rp.
355.796.132*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 355.796.132,- atau mencapai 10,85 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 3.279.935.000,-. Tidak Terdapat revisi target PNPB sampai dengan semester II tahun 2025.

Pendapatan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Alat dan Mesin	-	6.785.632	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	3.279.935.000	349.010.500	10,64
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	-
Jumlah	3.279.935.000	355.796.132	10,85

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 adalah 10,85 persen dan telah mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yaitu 110,7 persen Hal ini disebabkan tidak adanya realisasi pendapatan pengujian, kalibrasi dan standarisasi. Pendapatan yang diterima hanya dari proses sertifikasi saja dan penurunan realisasi PNBPN disebabkan terhambatnya ekspor udang ke Amerika akibat kontaminasi Cs-137. Serta target PNBPN yang ditetapkan Kemenkeu T-2 sehingga target PNBPN Tahun 2025 masih bergabung dengan target PNBPN Karantina Ikan dan digabung juga dengan target PNBPN UPT Jakarta I.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Alat dan Mesin	6.785.632	415.000	0,52
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	349.010.500	1.151.950.000	-82,07
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	125.000	-0,01
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	167.607	-0,02
Jumlah	355.796.132	1.152.657.607	-81,58

*Realisasi Belanja
Negara
Rp.8.907.722.929*

B.2. Belanja

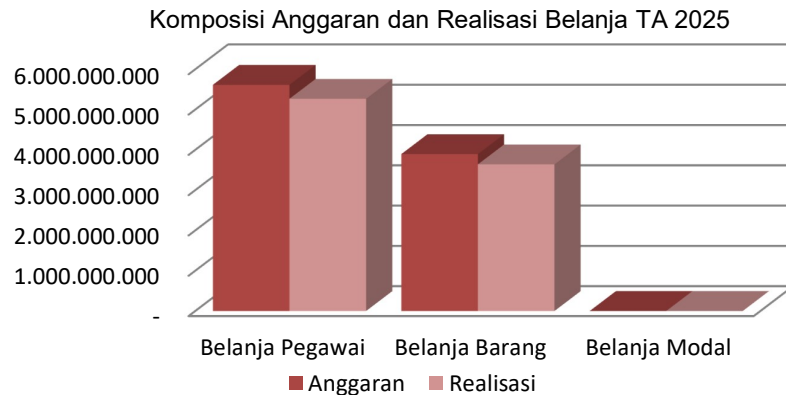
Realisasi belanja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5.613.834.000	5.267.729.995	93,83
Belanja Barang	3.895.285.000	3.639.992.934	93,45
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	9.509.119.000	8.907.722.929	93,68
Pengembalian		40	-
Jumlah	9.509.119.000	8.907.722.889	93,68

Realisasi belanja bruto SPPMHKP Merak semester II TA 2025 sebesar Rp. 8.907.722.929,- atau sebesar 93,68% dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. 40,-.

Komposisi realisasi Belanja SPPMHKP Merak Per 31 Desember 2025 menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, dalam hal jumlah anggaran belanja, TA 2025 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran belanja pada tahun 2025 terjadi pada anggaran belanja pegawai dan belanja barang karena adanya perubahan penambahan pegawai dimana satuan kerja UPT Stasiun PPMHKP Merak merupakan induk dari satker Balai Besar PPMHKP Jakarta I di wilayah Propinsi Banten. Namun dalam hal realisasi anggaran belanja TA 2025 telah mengalami penurunan sebesar 8,60 persen dibandingkan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.267.729.995	1.875.929.592	(3,51)
Belanja Barang	3.639.992.934	1.936.162.940	(5,08)
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	8.907.722.929	3.812.092.532	(8,60)

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp.5.267.729.995,- Rincian realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak Per 31 Desember 2025 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Tunjangan Khusus. Belanja Transito dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
Belanja Gaji Pokok PNS dan PPPK	1.724.489.220	679.484.800	1.045.004.420	153,79
Belanja Pembulatan Gaji PNS dan PPPK	26.140	11.421	14.719	128,88
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS dan PPPK	133.963.620	52.904.650	81.058.970	153,22
Belanja Tunj.Anak PNS dan PPPK	40.348.998	14.107.452	26.241.546	186,01
Belanja Tunj.Struktural PNS	19.620.000	16.560.000	3.060.000	18,48
Belanja Tunj.Fungsional PNS	117.845.000	42.820.000	75.025.000	175,21
Belanja Tunj.PPh PNS	11.104.891	3.960.521	7.144.370	0,00
Belanja Tunj.Beras PNS dan PPPK	101.315.580	39.396.480	61.919.100	157,17
Belanja Uang Makan PNS dan PPPK	256.264.000	90.879.000	165.385.000	181,98
Belanja Tunjangan Umum PNS dan PPPK	39.805.000	7.155.000	32.650.000	456,32
Belanja Lembur			0	0,00
Belanja Uang Lembur PNS dan PPPK	226.417.000	59.016.000	167.401.000	283,65
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito			0	0,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PNS dan PPPK	2.596.530.586	869.819.430	1.726.711.156	198,51
JML Bruto	5.267.730.035	1.876.114.754	3.391.615.281	180,78
Pengembalian Belanja	40	185.162	-185.122	-99,98
JML Netto	5.267.729.995	1.875.929.592	3.391.800.403	180,81

Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2025 adalah sebesar Rp. 5.267.730.035,-, dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp. 40,- sampai dengan semester II TA 2025. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2024 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.391.800.403,- atau sebesar 180,81 persen mengingat realisasi belanja pegawai pada TA 2024 sebesar Rp. 1.875.929.592,-. Kenaikan Belanja Pegawai pada semester II tahun 2025 disebabkan karena terdapat penambahan pegawai dari UPT Balai Besar PPMHKP Jakarta I karena adanya perubahan organisasi

yang sangat mempengaruhi kenaikan realisasi belanja pegawai pada semester II tahun 2025.

Belanja Barang

Rp.3.639.992.934

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Bruto TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.639.992.934,- dan Rp. 1.936.162.940,- Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 88 persen dari realisasi Belanja Barang TA 2024 antara lain:

1. Kenaikan realisasi belanja yang terjadi pada ;
 - a. Realisasi belanja Barang Operasional yaitu sebesar Rp. 952.312.178,- atau 183,89 persen;
 - b. Realisasi belanja Barang Pesediaan sebesar Rp. 87.719.750,- atau 153,14 persen;
 - c. Realisasi belanja jasa sebesar Rp. 576.905.146 atau 48,76 persen dan;
 - d. Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp. 401.102.420 atau 146,31 persen.

Semua kenaikan diatas disebabkan karena adanya perubahan organisasi dimana penggabungan dua satker yaitu UPT Stasiun PPMHKP Merak dan UPT Balai Besar PPMHKP Jakarta I dimana satker Stasiun PPMHKP Merak menjadi Induk satker. Sehingga menyebabkan semakin bertambahnya Program Kerja UPT sehingga memerlukan tambahan biaya keperluan Perkantoran dan Biaya Bahan untuk mendukung Kegiatan dan Program Kerja UPT.

2. Penurunan realisasi belanja terjadi pada realisasi belanja diantaranya :
 - a. barang non operasional sebesar Rp. (193.192.550) atau minus 77,68 persen;
 - b. belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp. (121.016.950) atau minus 50,20 persen.

Semua penurunan belanja pada belanja barang yang meliputi belanja non operasional dan belanja perjalanan dinas dikarena adanya efisiensi anggaran yang

menyebabkan beberapa anggaran harus diblokir pada tahun anggaran 2025.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.470.176.598	517.864.420	183,89
Belanja Barang Non Operasional	55.521.800	248.714.350	(77,68)
Belanja Barang Persediaan	145.000.850	57.281.100	153,14
Belanja Jasa	1.183.235.766	606.330.620	48,76
Belanja Pemeliharaan	675.251.220	274.148.800	146,31
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	110.806.700	231.823.650	(52,20)
Jumlah Belanja Kotor	3.639.992.934	1.936.162.940	88,00
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	3.639.992.934	1.936.162.940	88,00

*Belanja Modal
Rp.0*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan TA 2024 dikarenakan tidak adanya anggaran belanja modal di tahun 2025 dan tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal PM - Penanganan Pandemi	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

Belanja Modal
Tanah Rp.0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada kenaikan atau penurunan pada realisasi belanja modal pada TA 2025. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah

TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	00,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	00,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	00,00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp.0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan pada realisasi belanja modal peralatan dan mesin dikarenakan tidak adanya anggaran belanja Modal sampai akhir Tahun 2025 dan 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Alat Bantu (Pompa Air)	0	0	0,00
Alat Angkutan	0	0	0,00
Alat Bengkel dan Ukur	0	0	0,00
Alat Pengolahan (Rak Penyimpanan)	0	0	0,00
Alat Kantor dan Rumah tangga (Lemari)	0	0	0,00
Alat Kantor dan Rumah tangga (AC)	0	0	0,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0	0,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0	0,00
Alat Laboratorium	0	0	0,00
Personal Komputer (Laptop)	0	0	0,00
Peralatan Komputer Lainnya (Printer)	0	0	0,00
Pealatan Komputer Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.0,-.*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 dan TA 2024 masing masing sebesar Rp.0,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp.0,-*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak ada realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan semester II TA 2025 dan TA 2024 masing masing sebesar Rp.0

*Belanja Modal
Lainnya Rp. 0,-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak ada realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan semester II TA 2025 dan TA 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Stasiun PPMHKP Merak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan TA 2024

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Uang Tunai	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerima

Sedangkan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan TA 2024

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Uang Tunai	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp.0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan

kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Pada akhir periode semester II TA 2025 pada Stasiun Karantina Ikan Merak, tidak terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2025 dan TA 2024*

Keterangan	TA 2025	TA 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB
P. 103.008,-

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 103.008,- dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Piutang PNB	103.008	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	103.008	-

Utang PNB TA. 2025 sebesar Rp. 103.008 merupakan potongan sakit pada tunjangan kinerja Pegawai PNS dan PPPK bulan Desember 2025 yang harus disetorkan ke negara.

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
P. 0.-

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing

sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp. 0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak
Rp.(515),-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.(515) dan Rp.0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur yaitu 0,5% dari nilai piutang sebesar Rp.103.008,-.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2025 dan TA 2024

Uraian	TA 2025	TA 2024
Penyisihan Piutang tidak Tertagih	(515)	-
Jumlah	(515)	-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp.
90.500.000,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 90.500.000,- dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan pada tahun berjalan secara penuh namun manfaat barang atau jasa belum diterima seluruhnya dan melampaui tahun anggaran berjalan.

Dalam hal ini belanja dibayar dimuka pada tahun anggaran 2025 adalah belanja sewa rumah arsip sebesar Rp.

30.000.000,- dan belanja sewa mesin fotocopy Rp. 60.500.000,-.

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2025 dan TA 2024*

Uraian	TA 2025	TA 2024
Belanja dibayar dimuka	90.500.000	-
Jumlah	90.500.000	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp. 102.493,-*

C.9 Piutang Bukan Pajak Bersih (Neto)

Piutang bukan pajak bersih per tanggal 31 Desember 2025 merupakan hasil dari selisih antara Piutang Bukan Pajak dan Penyisihan Piutang tertagih yang Mana Menghasilkan nilai sebesar Rp. 102.493,- dan Per tanggal 31 Desember 2024 menghasilkan nilai sebesar Rp.0,- yaitu hasil dari Piutang Bukan pajak Rp. 103.008,- dan Penyisihan Piutang tertagihnya Rp. (515).

*Persediaan Rp.
175.468.020,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.175.468.020,- dan Rp. 40.236.899,- .

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan TA 2024

Persediaan	TA 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	169.783.320	34.039.049
Bahan untuk Pemeliharaan	5.321.200	6.037.850
Suku Cadang	-	160.000
Bahan Baku	363.500	74.000
Jumlah	175.468.020	40.310.899

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Rp.0,- Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Angsuran Rp.0,- Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp.0,- Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah Rp. **C.14 Tanah**

8.330.878.900,- Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sama sebesar Rp. 8.330.878.900,-. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	8.330.878.900
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Selisih revaluasi aset	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	8.330.878.900
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	8.330.878.900

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	500 m2	Jl. Raya Tol Merak KM 1 No.1 Merak	1.468.864.000
2	3355 m2	Jl. Lingkar Selatan Kali Timbang Cibeber Cilegon	6.862.014.900
Jumlah			8.330.878.900

Dari jumlah/nilai tanah di atas, tidak terdapat jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

*Peralatan dan
Mesin Rp.
7.885.558.401*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp.7.885.558.401,- dan Rp. 4.354.849.636,-.

Saldo Peralatan dan Mesin per 30 September 2025 sebanyak 571 unit dengan nilai sebesar Rp.7.885.558.401,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Peralatan dan Mesin sebanyak 336 unit dengan nilai sebesar Rp.4.354.849.636,-, mutasi tambah sebanyak 259 unit dengan nilai sebesar Rp.4.191.283.830,- dan mutasi kurang sebanyak 24 unit dengan nilai sebesar Rp.660.575.065,-.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp	4.354.849.636
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	3.523.897.760
Reklas Masuk	Rp	667.386.070
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	-
Mutasi kurang:		
Reklas Keluar	Rp	(618.736.070)
Aset yg dihentikan dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(41.838.995)
Pembelian Ekstrakomptable	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	7.885.558.401
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp	(7.353.535.910)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		532.022.491

Pada transaksi mutasi masuk hanya terdapat transaksi transfer masuk berupa peralatan dan mesin sebanyak 235 unit sebesar Rp. 3.523.897.760,- dan reklas masuk sebanyak 24 unit sebesar Rp. 667.386.070 sampai pada akhir periode pelaporan Tahun 2025.

Pada transaksi mutasi kurang terdapat 24 unit aset peralatan dan mesin yang di reklas keluar yaitu sebesar Rp. (618.736.070) dan terdapat 23 unit Aset yang dilakukan koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp. (41.838.995) sampai dengan periode 31 Desember 2025. Serta Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada TA 2025 dengan Rincian sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Intrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3,01	Alat Besar	2	299.906.100	298.694.616	1.211.484
3,02	Alat Angkutan	24	2.412.588.000	2.412.588.000	-
3,03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	3.770.000	3.770.000	-
3,04	Alat Pengolahan	6	14.154.500	12.156.500	1.998.000
3,05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	305	1.172.643.103	1.052.700.493	119.942.610
3,06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	22	203.362.100	191.728.020	11.634.080
3,07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	15	21.750.000	21.750.000	-
3,08	Alat Laboratorium	71	2.215.854.083	1.977.824.574	238.029.509
3,09	Alat Persenjataan	0	0	0	-
3,10	Komputer	125	1.541.530.515	1.476.061.765	65.468.750
3,11	Alat Eksplorasi	0	0	0	-
3,13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0	0	0	-
3,14	Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0	-
3,15	Alat Keselamatan Kerja	0	0	0	-
3,16	Alat Peraga	0	0	0	-
3,17	Peralatan Proses/Produksi	0	0	0	-
3,18	Rambu - Rambu	0	0	0	-
3,19	Peralatan Olah Raga	0	0	0	-
Jumlah		571	7.885.558.401	7.447.273.968	438.284.433

Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Ekstrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
3,04	Alat Pengolahan dan Pertanian	1	900.000	900.000	-
3,05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	12	7.748.000	5.848.000	1.900.000
3,06	Alat Komunikasi	1	410.000	287.000	123.000
3,07	Alat Kedokteran	0	0	0	-
Jumlah		13	9.058.000	7.035.000	2.023.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan Rp.
4.566.738.645.*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Rp. 4.566.738.645,- dan Rp. 1.881.671.150,- Saldo Gedung dan Bangunan pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Merak per 31 Desember 2025 sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp. 4.566.738.645,-. Jumlah tersebut merupakan saldo awal per *31 Desember 2024 Audited* sebesar Rp. 1.881.671.150,- sebanyak 4 unit dan terdapat mutasi tambah pada Gedung dan Bangunan sebanyak 1 unit sebesar Rp. 3.862.443.740,- serta mutasi kurang sebanyak 2 unit sebesar Rp. 1.177.376.245,- sampai dengan periode Semester II tahun 2025. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	1.881.671.150
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	2.643.228.500
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Koreksi pencatatan	1.219.215.240
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai tim penerbitan aset	(1.177.376.245)
Saldo per 31 Desember 2025	4.566.738.645
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(912.737.332)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	3.654.001.313

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

- e. Saldo Bangunan Gedung pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Merak per 31 Desember 2025 sebanyak **3 unit** sebesar **Rp. 4.566.738.645,-**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 31 Desember 2024 audited sebanyak **4 unit** sebesar **Rp. 1.881.671.150,-**. Transfer masuk sebanyak **1 unit** sebesar **Rp. 2.643.228.500,-** dan koreksi pencatatan nilai bertambah sebesar **Rp. 1.219.215.240,-** serta koreksi pencatatan berkurang sebanyak **2 unit** Sebesar **Rp. 1.177.376.245,-**

Mutasi tambah sampai akhir periode Semester II TA. 2025 ditampilkan pada table berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuan- titas	Intra- komtabel	Kuan- titas	Ekstra- komtabel
	(Unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)
Penambahan Saldo Awal (100)	-	-	-	-
Pembelian (101)	-	-	-	-
Transfer Masuk (102)	1	2.643.228.500	-	-
Penylsian Pmbngnn Dngn KDP (105)	-	-	-	-
Reklasifikasi Masuk (107)	-	-	-	-
Reklas dr Aset Lainnya Ke Aset Tetap (177)	-	-	-	-
Pengembangan Nilai Aset (202)	-	-	-	-
Koreksi Pencatatan Nilai bertambah (204)	-	1.219.215.240	-	-
Koreksi Kesalahan Input IP (225)	-	-	-	-
Jumlah	1	3.862.443.740	-	-

Mutasi kurang pada Bangunan Gedung sampai dengan 31 Desember 2025.

Uraian Jenis Transaksi	Kuan- titas	Intra-komtabel	Kuan- titas	Ekstra- komtabel
	(Unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)	-	-	-	-
Koreksi Senu Hasil Penilaian Kembali (223)	-	-	-	-
Penghapusan (301)	-	-	-	-
Transfer keluar (302)	-	-	-	-
Hibah keluar (303)	-	-	-	-
Reklasifikasi Keluar (304)	-	-	-	-
Koreksi Pencatatan (305)	2	(1.177.376.245)	-	-
Penghentian Aset Dr Pnggnaan (401)	-	-	-	-
Jumlah	2	(1.177.376.245)	-	-

Dari jumlah aset Bangunan Gedung di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah aset Bangunan Gedung di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	3	4.566.738.645
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional.

Perkembangan Unit dan Nilai Bangunan Gedung
Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang
Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil
Perikanan Merak Periode TA. 2025

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun
		01/01/2025	31/12/2025			01/01/2025	31/12/2025	
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	1	-2	-200	1.833.959.150	1.875.798.145	41.838.995
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	1	1	0	0	2.643.228.500	2.643.228.500
	Jumlah	3	2	-1	-50	1.833.959.150	4.519.026.645	2.685.067.495

b. Tugu Titik Kontrol/Pasti

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Merak per 31 Desember 2025 sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp. 47.712.000,-. Jumlah tersebut merupakan saldo awal per 31 Desember 2024 *Audited* sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp. 47.712.000,-, dan tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang sampai akhir periode Semester II TA. 2025.

Tidak terdapat Mutasi tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2025 meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Kuan- titas	Intra- komtabel	Kuan- titas	Ekstra- komtabel
	(Unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)
Penambahan Saldo Awal (100)	-	-	-	-
Pembelian (101)	-	-	-	-
Transfer Masuk (102)	-	-	-	-
Penyiswaan Pmbngnn Dgn KDP (105)	-	-	-	-
Reklasifikasi Masuk (107)	-	-	-	-
Reklas dr Aset Lainnya Ke Aset Tetap (177)	-	-	-	-
Pengembangan Nilai Aset (202)	-	-	-	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)	-	-	-	-
Koreksi Kesalahan Input IP (225)	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Tidak terdapat mutasi kurang Tugu Titik Kontrol/Pasti sampai periode per 31 Desember 2025.

Uraian Jenis Transaksi	Kuan- titas	Intra- komtabel	Kuan- titas	Ekstra- komtabel
	(Unit)	(Rp)	(Unit)	(Rp)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)	-	-	-	-
Koreksi Senu Hasil Penilaian Kembali	-	-	-	-
Penghapusan (301)	-	-	-	-
Transfer keluar (302)	-	-	-	-
Hibah keluar (303)	-	-	-	-
Reklasifikasi Keluar (304)	-	-	-	-
Koreksi Pencatatan (305)	-	-	-	-
Penghentian Aset Dr Pnggnaan (401)	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

Dari jumlah aset Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, tidak terdapat asset yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah aset Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
	(Unit)	(Rp)
Baik	1	47,712,000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok barang Tugu Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

**Perkembangan Unit dan Nilai Tugu Titik Kontrol/ Pasti
Intrakomptabel Menurut Kelompok Barang
Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Keamanan
Hasil Perikanan Merak Periode TA. 2025**

Kode	Kelompok	Jumlah		Naik Turun	%	Nilai		Naik Turun	%
		31/12/2024	31/12/2025			31/12/2024	31/12/2025		
4.01.01	Tugu Tanda Batas	1	1	0	0	47.712.000	47.712.000	.	.
Jumlah		1	1	0	0	47.712.000	47.712.000	0	0,00

Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Intrakomptabel per bidang barang adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
4,01	Bangunan Gedung	2	4.519.026.645	903.081.332	3.615.945.313
4,04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	47.712.000	9.656.000	38.056.000
Jumlah		3	4.566.738.645	912.737.332	3.654.001.313

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.0,-*

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 30.500.000,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	30.500.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Reklas Keluar	(30.500.000)
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

C.17.1 Jalan

Tidak terdapat asset Jalan Intrakomptabel maupun Ekstrakomptable pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Merak sampai akhir periode Semester II T.A. 2025.

C.17.2 Irigasi

Tidak terdapat asset Irigasi Intrakomptabel maupun Ekstrakomptable pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian

Mutu Keamanan Hasil Perikanan Merak sampai akhir periode Semester II T.A. 2025.

C.17.3 Jaringan

Saldo Jaringan pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Merak per 31 Desember 2025 sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp.0,-. Jumlah tersebut merupakan saldo awal Jaringan per 31 Desember 2024 *Audited* sebanyak 1 unit sebesar Rp. 30.500.000 dan terdapat pengurangan Saldo Jaringan sebanyak 1 unit sebesar Rp. 30.500.000,- sampai akhir periode Semester II T.A. 2025.

Dari jumlah aset Jaringan di atas, tidak terdapat yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Dari jumlah aset Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya dalam keadaan baik.

Rincian Akumulasi Penyusutan Jaringan Intrakomtabel per bidang barang adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
5,04	Jaringan	0	0	0	-
Jumlah		0	0	0	0

*Aset Tetap
Lainnya Rp.
34.374.000,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 34.374.000,- dan Rp. 24.374.000. Aset tetap tersebut berupa monografi sebanyak 11 buah senilai Rp. 24.104.500,- dan bahan kartografi sebanyak 2 buah senilai Rp. 269.500,-. Dan terdapat mutasi tambah berupa bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebanyak 1 buah sebesar Rp. 10.000.000,-. Tidak terdapat mutasi kurang atas aset tetap ini untuk TA 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	24.374.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	10.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2025	34.374.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	34.374.000

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0.*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SPPMHKP Merak sampai dengan periode Semester II TA 2025.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap Rp.
(8.360.011.300)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp.(8.360.011.300) dan Rp. (4.176.765.442). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2025*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7.885.558.401	7.447.273.968	438.284.433
2	Gedung dan Bangunan	4.566.738.645	912.737.332	3.654.001.313
3	Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	34.374.000	0	34.374.000
Akumulasi Penyusutan		12.486.671.046	8.360.011.300	4.126.659.746

*Aset Tak
Berwujud Rp.0,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 18.150.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik yaitu berupa Software.

Terdapat mutasi kurang yaitu berupa koreksi pencatatan sebesar Rp. 18.150.000,- pada asset tidak berwujud sehingga tidak ada lagi nilai Aset tak berwujud (Rp.0) sampai dengan periode akhir tahun 2025.

*Aset Lain-Lain
Rp.0,-*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan/A
mortisasi Aset
Lainnya Rp.(0)*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp.(0) dan Rp. (18.150.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.
15.363.783,-*

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.15.363.783,- dan Rp. 78.114.050,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan sistem akuntansi secara akrual dimana pencatatan ini dikhususkan terkait utang yang belum dibayarkan pada pihak ke tiga yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan), seperti belanja langganan daya dan jasa dan kekurangan gaji pegawai.

Utang kepada pihak ketiga sampai dengan periode Semester II TA 2025 pada Stasiun PPMHKP Merak adalah merupakan sistem akuntansi secara akrual dimana pencatatan ini

dikhususkan terkait utang yang belum dibayarkan pada pihak ke tiga yang harus segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) yaitu berupa belanja langganan daya dan jasa diantaranya belanja langganan Listrik sebesar Rp. 15.251.401,- dan belanja langganan telpon sebesar Rp. 112.382,- pada bulan Desember 2025.

Perbandingan Saldo Utang pada pihak ketiga disajikan pada table berikut ini:

Utang Pada Pihak Ke Tiga
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Utang pada Pihak Ke Tiga	15.363.783	78.114.050	-62.750.267
Jumlah	15.363.783	78.114.050	-62.750.267

*Utang yang
Belum
ditagihkan
Rp.0,-*

C.25 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sama yaitu sebesar Rp. 0.

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST/SPBy belum SPP (saldo utang yang belum diterima tagihannya).

*Pendapatan
Diterima di
Muka Rp.0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sama yaitu masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang
masih harus
dibayar
Rp.0*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sama yaitu masing masing sebesar Rp. 0,- Beban yang masih harus dibayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas Rp.

C.28 Ekuitas

12.708.245.376 Ekuitas pada SPPMHKP Merak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.708.245.376,- dan Rp. 10.407.631.093,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP Rp.
349.010.500,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 349.010.500,- dan Rp. 1.152.075.000,-.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak LO TA 2025 dan TA 2024

Akun	URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	349.010.500	1.151.950.000
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan		125.000
Jumlah		349.010.500	1.152.075.000

Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal dari Pendapatan pengujian laboratorium, jasa sertifikat kesehatan ikan ekspor, dan jasa sertifikat pelepasan impor karantina ikan, kalibrasi serta standarisasi lainnya sebesar Rp. 349.010.500,- dan Pendapatan Jasa Perikanan berupa biaya pemeriksaan klinis, jasa pengamatan, jasa pengasingan sebesar Rp.0,-.

Pendapatan pada LO Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp. 355.796.132,- terdapat selisih sebesar **Rp. 6.785.632,-**. Selisih tersebut diperoleh dari Pendapatan Lain-lain berupa Pendapatan dari Penjualan Alat dan Mesin Sebesar Rp. 6.785.632.

Perbandingan Pendapatan PNBPN-LO dengan Pendapatan PNBPN-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

Pendapatan PNPB_LO	Pendapatan PNPB_LRA	Selisih
349.010.500	355.796.132	(6.785.632)
Jumlah	355.796.132	(6.785.632)

Rincian selisih antara Pendapatan PNPB-LO dengan Pendapatan PNPB-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih PNPB-LO dan Pendapatan PNPB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Akun	URAIAN	Pendapatan PNPB-LO	Pendapatan PNPB-LRA	Selisih
425122	Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	6.785.632	(6.785.632,00)
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	349.010.500	349.010.500	0,00
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-	0,00
425911	Penerimaan Kembali Bel Pegawai TAYL	-	-	-
Jumlah		349.010.500	355.796.132	(6.785.632)

Selisih tersebut diperoleh dari Pendapatan Lain-lain yaitu Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 6.785.632,- yang sudah disetorkan langsung oleh Pemenang Lelang ke Rekening Negara.

*Beban Pegawai
Rp.
5.198.629.937,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.198.629.937,- dan Rp. 1.944.926.642. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Perbandingan Beban Pegawai-LO Stasiun PPMHKP
Merak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel
sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
Belanja Gaji Pokok PNS dan PPPK	1.724.489.220	679.484.800	1.045.004.420	153,79
Belanja Pembulatan Gaji PNS Dan PPPK	26.100	11.259	14.841	131,81
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS dan PPPK	133.963.620	52.904.650	81.058.970	153,22
Belanja Tunj.Anak PNS dan PPPK	40.348.998	14.107.452	26.241.546	186,01
Belanja Tunj.Struktural PNS	19.620.000	16.560.000	3.060.000	18,48
Belanja Tunj.Fungsional PNS	117.845.000	42.820.000	75.025.000	175,21
Belanja Tunj.PPh PNS	11.104.891	3.960.521	7.144.370	0,00
Belanja Tunj.Beras PNS dan PPPK	101.315.580	39.396.480	61.919.100	157,17
Belanja Uang Makan PNS dan PPPK	256.264.000	90.879.000	165.385.000	181,98
Belanja Tunjangan Umum PNS dan PPPK	39.805.000	6.970.000	32.835.000	471,09
Belanja Lembur			0	0,00
Belanja Uang Lembur PNS dan PPPK	226.417.000	59.016.000	167.401.000	0,00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito			0	0,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PNS dan PPPK	2.527.430.528	938.816.480	1.588.614.048	169,21
JUMLAH	5.198.629.937	1.944.926.642	3.253.703.295	167,29

Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-

LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pegawai-LO dan Beban Pegawai -LRA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

Beban Pegawai_LO	Belanja Pegawai_LRA	Selisih
5.198.629.937	5.267.729.995	(69.100.058)
Jumlah	5.267.729.995	(69.100.058)

Untuk periode 31 Desember 2025 ini, beban pegawai SPPMHKP Merak pada Laporan Operasional sebesar Rp. 5.198.629.937,- terdapat selisih dengan Realisasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp.5.267.729.995,-. Selisih sebesar Rp. (69.100.058). disebabkan beban pegawai-LO dicatat berdasar basis akrual sedangkan belanja pegawai-LRA dicatat berdasar basis kas. Selisih tersebut merupakan pembayaran Tunjangan Kinerja PNS sebesar Rp. 65.486.650,- dan Tunjangan Kinerja PPPK sebesar Rp. 3.510.400,- pada bulan Desember 2024 yang dibayarkan di tahun 2025 tetapi menggunakan DIPA Tahun 2025. yang mana SPM nya dibuat dibulan desember 2024 sedangkan SP2Dnya terbit di bulan Januari 2025. Ditambah Pengembalian Tunjangan Kinerja atas potongan disiplin pegawai sebesar Rp. 103.008,-.

Beban

*Persediaan Rp.
254.892.202,-.*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada periode Semester II Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.254.892.202,- dan Rp. 47.405.335,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	Kenaikan/Penurunan	persentase (%)
Beban Persediaan Konsumsi	203.141.997	47.331.335	155.810.662	329,19
Beban Persediaan Bahan Baku	51.750.205	74.000	51.676.205	69832,71
Jumlah Beban Persediaan	254.892.202	47.405.335	207.486.867	437,69

*Beban Barang
dan Jasa Rp.
2.624.680.947,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.624.680.947,- dan Rp. 1.371.934.490,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan pada Beban Barang terjadi dikarenakan bertambahnya aktifitas dan penambahan pada program kegiatan Stasiun PPMHKP Merak digabungkan dengan kegiatan Balai Besar PPMHKP Jakarta I berupa Quality Assurance dan Bulan Mutu Karantina, serta pengembangan Inovasi Pelayanan Publik melalui aplikasi pada tahun 2025. Sedang Penurunan pada Beban Barang dan Jasa terjadi dikarenakan adanya beberapa anggaran yang diblokir karena efisiensi pada tahun anggaran 2025 di Stasiun PPMHKP Merak.

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Beban Barang dan Jasa	2.624.680.947	1.371.934.490	1.252.746.457
Jumlah	2.624.680.947	1.371.934.490	1.252.746.457

Sedangkan rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.171.250.898	367.670.520	218,56
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8.778.000	25.077.300	-65,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.253.300	1.018.800	23,02
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	115.990.000	86.188.000	34,58
Beban Barang Operasional Lainnya	172.904.400	37.909.800	356,09
Beban Bahan	55.521.800	243.145.450	-77,17
Beban Honor Output Kegiatan	0	800.000	-100,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	4.768.900	-100,00
Beban Langganan Listrik	187.543.839	114.659.200	63,57
Beban Langganan Telepon	2.163.910	5.828.400	-62,87
Beban Langganan Air	31.980.000	40.080.000	-20,21
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	450.000	0	#DIV/0!
Beban Sewa	47.500.000	44.199.000	7,47
Beban Jasa Profesi	2.700.000	13.700.000	-80,29
Beban Jasa Lainnya	826.644.800	386.889.120	113,66
Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Jumlah	2.624.680.947	1.371.934.490	91,31

*Beban
Pemeliharaan
Rp.686.488.367,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 686.488.367,- dan Rp. 290.782.350,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 395.706.017 atau sebesar 136,08 persen.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	340.230.450	95.052.400	257,94
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	335.020.770	179.096.400	87,06
Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	11.077.147	16.633.550	-33,40
Beban Persediaan Suku Cadang	160.000		#DIV/0!
Jumlah	686.488.367	290.782.350	136,08

*Beban
Perjalanan Dinas
Rp.
110.806.700,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 110.806.700,- dan Rp. 231.823.650,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Pada tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan pada beban perjalanan dinas sebesar (52,20) persen dibandingkan beban perjalanan yang terjadi pada tahun 2024. Penurunan beban perjalanan dinas karena sebagian dari anggaran perjalanan dinas terblokir karena efisiensi dan sebagian menggunakan sumber dana dari PNBPN.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
524111	Beban Perjalanan Biasa	109.156.700	221.423.650	-50,70
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.650.000	10.400.000	-84,13
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	100,00
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah		110.806.700	231.823.650	-52,20

*Beban Barang
untuk
Diserahkan*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-

kepada Masyarakat Rp. 0.

. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp. 0.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 318.633.599,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.318.633.599,- dan Rp. 285.476.874,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	200.311.712	238.205.945	-15,91
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	118.321.887	43.985.512	169,00
Beban Penyusutan Jaringan	-	1.016.667	-100,00
Beban Amortisasi Software	-	2.268.750	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	318.633.599	285.476.874	11,61

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.
515,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 515,- dan Rp.0,-.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	515	-	0,00
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	515	-	0,00

*Surplus/Defisit
Kegiatan Non
Operasional Rp.
(123.027.568)*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2025 dan 2024 masing-masing Rp. (123.027.568) dan Rp. (2.860.782) adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/(Defisit) Pelepasan aset non lancar:	6.785.632	(2.860.782)	
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	6.785.632	(415.000)	0,00
Beban Pelepasan aset non lancar	-	(3.275.782)	0,00
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya:	(129.813.200)	-	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya:	129.813.200	-	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(123.027.568)	(2.860.782)	0,00

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena*

kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa

D.12 Pos Luar Biasa

Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa periode TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.10.407.631.093

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.10.407.631.093,- dan Rp. 10.796.613.095,-.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp(8.968.149.335)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. (8.968.149.335) dan Rp. (3.023.135.123). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp.0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sama yaitu sebesar Rp. 0,-.

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas Rp.(146.626.714)

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.(146.626.714) dan Rp. 838,-. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas, antara lain berasal dari koreksi kesalahan atas beban periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah

diterbitkan, yang tidak berulang dan mengakibatkan penambahan beban dan/atau koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO periode sebelumnya, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang tidak berulang dan menambah maupun mengurangi posisi kas.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp.0,-

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sama yaitu sebesar Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp.0,-

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sama yaitu sebesar Rp.0 dan Rp. 2.832.500.

Koreksi atas

Reklasifikasi

Rp.0,-

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Selisih

Revaluasi Aset

Tetap Rp.0,-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,-.

KoreksiAset

Tetap Non

Revaluasi Rp.

(146.626.714)

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.(146.626.714) dan Rp. 0,-.

*Koreksi Lain-
Lain Rp.0,-*

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 838,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain adalah koreksi penyisihan piutang tidak tertagih.

*Transaksi
Antar Entitas
Rp.
11.415.390.332,-*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.11.415.390.332,- dan Rp. 2.634.152.283,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai		NAIK (TURUN) %
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.907.722.929	3.812.092.532	133,67
Diterima Dari Entitas Lain	(355.796.132)	(1.152.657.607)	(69,13)
Transfer Keluar	(436.250)	(42.441.767)	0,00
Transfer Masuk	2.863.899.785	17.159.125	16590,24
Pengesahan Hibah Langsung	-	-	0,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-	0,00
Jumlah	11.415.390.332	2.634.152.283	333,36

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp. (355.796.132) sedangkan DKEL sebesar Rp. 8.907.722.929,-

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk selama periode TA. 2025 senilai Rp. 2.863.899.785,- merupakan Transfer Masuk barang konsumsi berupa barang cetakan sertifikat mutu (HC) terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Konsumsi	Setban KIPM, BBKIPM JKT I	Rp 306.396.368
2	Bahan Pemeliharaan	BBKIPM JKT I	Rp 28.098.997
3	Bahan Baku	BBKIPM JKT I dan BUSPM	Rp 52.113.705
4	Peralatan dan Mesin	BBKIPM JKT I dan BUSPM	Rp 2.477.290.715
	Jumlah		Rp 2.863.899.785

Transfer Keluar selama periode tahun anggaran 2025 senilai Rp.436.250,- yang merupakan barang konsumsi berupa cetakan sertifikat mutu kode F dan sertifikat KID-1 yang dikirimkan dari Stasiun PPMHKP Merak ke Balai PPMHKP Lampung, serta pengalihan Aset BMN peralatan dan Mesin ke Badan Karantina Indonesia.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Konsumsi	BKIPM Lampung	436.250
	Jumlah		436.250

tidak terdapat selisih pada Transfer Keluar / Transfer Masuk sampai pada Tahun Anggaran 2025 dengan Sekretariat BPPMHKP ataupun UPT lainnya.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah

dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp. 0,-.

*Kenaikan
Ekuitas Rp.
2.300.614.283,-*

E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Untuk periode yang berakhir sampai 31 Desember 2025 SPPMHKP Merak mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp. 2.300.614.283,- sedangkan untuk periode 31 Desember 2024 SPPMHKP Merak memperoleh penurunan ekuitas sebesar Rp. (388.982.002).

*Ekuitas Akhir Rp.
12.708.245.376*

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir SPPMHKP Merak pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.12.708.245.376,- sedangkan untuk periode 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.407.631.093,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada periode Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca per 31 Desember 2025.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. SPPMHKP Merak pada awal tahun 2025 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar **Rp. 10.240.391.000,-** Sampai dengan Akhir Periode tahun 2025 telah melakukan 10 (sepuluh) kali revisi pagu anggaran yang merubah nilai menjadi sebesar **Rp. 9.509.119.000,-**
2. Pagu Anggaran Prioritas Nasional (PN) adalah sebesar Rp. 393.858.000 dan realisasi Rp. 285.688.650 (72,53%) dengan rincian sebagai berikut:

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%
Lembaga Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang divalidasi	25.440.000	25.059.000	98,5	Lembaga	22	22	100
Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidas	62.128.000	31.953.000	51,43	Produk	257	257	100
Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	32.120.000	26.890.000	83,72	Lembaga	1	1	100
Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	192.170.000	179.586.650	93,45	Rekomendasi	1	1	100
Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	25.000.000	0	0	Produk	1	0	0
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan	25.000.000	0	0	Lembaga	20	20	100

Keamanan Hasil Perikanan							
Unit kerja yang menerapkan Standar Sistem Pengujian mutu	25.000.000	22.200.000	88,8	Lembaga	1	1	100
Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	7.000.000	0	0	Produk	1	1	100

3. Laporan Kinerja Satker dan Capaian Output RO periode Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP
		Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian	
04	EKONOMI	9.509.119.000	8.907.722.969	93,68%					
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	9.509.119.000	8.907.722.969	93,68%					
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	413.858.000	285.688.650	69,03%					
3989	Pengendalian Mutu	142.568.000	57.012.000	39,99%					
BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	5.000.000	0	0,00%					
001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor-impornya	5.000.000	0	0,00%	1	Produk	1	100%	100,00%
PDC	Sertifikasi Produk	62.128.000	31.953.000	51,43%					
002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	62.128.000	31.953.000	51,43%	257	Produk	257	100%	48,57%
PDF	Sertifikasi Lembaga	25.440.000	25.059.000	98,50%					
002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	25.440.000	25.059.000	98,50%	22	Lembaga	22	100%	1,50%
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	25.000.000	0	0,00%					
001	Hasil Perikanan di Wilayah RI yang diawasi mutunya	25.000.000	0	0,00%	1	Lembaga	1	100%	100,00%
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	25.000.000	0	0,00%					
002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	25.000.000	0	0,00%	20	Lembaga	20	100%	100,00%
7010	Manajemen Mutu	271.290.000	228.676.650	84,29%					
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	8.000.000	0	0,00%					
001	Rekomendasi Kebijakan harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8.000.000	0	0,00%	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100%	100,00%
DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	7.000.000	0	0,00%					
001	BIMTEK Peningkatan Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.000.000	0	0,00%	1	Kegiatan	1	100%	100,00%
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	192.170.000	179.586.650	93,45%					
001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan	192.170.000	179.586.650	93,45%	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100%	6,55%
PDD	Standarisasi Lembaga	57.120.000	49.090.000	85,94%					
001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	25.000.000	22.200.000	88,80%	1	Lembaga	1	100%	11,20%
002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	32.120.000	26.890.000	83,72%	1	Lembaga	1	100%	16,28%
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	7.000.000	0	0,00%					
001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	7.000.000	0	0,00%	1	Produk	1	100%	100,00%
WA	Program Dukungan Manajemen	9.095.261.000	8.578.844.119	94,32%					
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan	9.095.261.000	8.578.844.119	94,32%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.015.457.000	8.578.844.119	95,16%					
962	Layanan Umum	57.296.000	45.997.300	80,28%	1	Layanan	1	100%	19,72%
994	Layanan Perkantoran	8.958.161.000	8.532.846.819	95,25%	1	Layanan	1	100%	4,75%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	79.804.000	94.338.000	97,67%					
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	43.200.000	43.190.200	99,98%	1	Dokumen	1	100%	0,02%
955	Layanan Manajemen Keuangan	36.604.000	0	0,00%	1	Dokumen	1	100%	100,00%

4. Terdapat pendapatan dari penjualan BMN (Pendapatan Lelang Peralatan laboratorium) senilai Rp. 6.785.632,- sebanyak 6 unit. Dengan nomor BAST : B.2107/BBPPMHKP.JKT.I/PL.450/VII/2025.
5. Terdapat Transfer Masuk berupa Barang Konsumsi, Bahan Pemeliharaan dan Bahan Baku dari sekretariat BPPMHKP sebesar Rp. 185.860.810,- dan dari Balai Besar PPMHKP Jakarta I Sebesar Rp. 200.748.260,-. Transfer Masuk berupa Peralatan/Mesin dan Gedung Bangunan dari Sekretariat BPPMHKP dan BBPPMHKP Jakarta I sebesar Rp. 2.477.290.715. Transfer Keluar ke Balai PPMHKP Lampung berupa sertifikat Mutu B dan Sertifikat KID-1 sebesar Rp. 436.250,- sampai dengan 31 Desember 2025.
6. Stasiun PPMHKP Merak tidak terdapat anggaran yang bersumber dana Hibah dan PHLN.
7. Terdapat pengembalian belanja sampai dengan akhir periode tahun 2025 yaitu pengembalian belanja Pembulatan Gaji sebesar Rp.40,-.
8. Laporan Keuangan Stasiun PPMHKP Merak TA 2025 hasil rekonsiliasi Sistem Akuntansi Instansi (SAKTI dan MonSAKTI) dengan Sistem Akuntansi Umum Kemenkeu (SPAN) yang disusun secara berjenjang.
9. Sepanjang tahun anggaran 2025 ada perubahan organisasi pada Eselon BPPMHKP dimana Stasiun PPMHKP Merak telah menjadi induk satker dari Balai Besar PPMHKP Jakarta I di Wilayah Banten.

LAMPIRAN

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032

UNIT ORGANISASI : 13

WILAYAH/PROVINSI : 2900

SATUAN KERJA : 649688

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL

BANTEN

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl. Cetak 04/05/2026 9:01 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	34,039,049	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	6,037,850	0
0.0	117114	Suku Cadang	160,000	0
0.0	131111	Tanah	8,330,878,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,354,849,636	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,881,671,150	0
0.0	134113	Jaringan	30,500,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	24,374,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,856,579,606
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	305,444,174
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	14,741,662
0.0	162151	Software	18,150,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	18,150,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	68,997,050
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	9,117,000
0.0	391111	Ekuitas	0	10,407,631,093
JUMLAH			14,680,660,585	14,680,660,585

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK 649688

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:59 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,279,935,000	355,796,132	(2,924,138,868)	11	1,041,200,000	1,152,657,607	(111,457,607)	111
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,279,935,000	355,796,132	(2,924,138,868)	11	1,041,200,000	1,152,657,607	(111,457,607)	111
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	3,279,935,000	355,796,132	(2,924,138,868)	11	1,041,200,000	1,152,657,607	(111,457,607)	111
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	9,509,119,000	8,907,722,929	(601,396,071)	94	3,892,107,000	3,812,092,532	80,014,468	98
1. Belanja Pegawai	5,613,834,000	5,267,729,995	(346,104,005)	94	1,927,064,000	1,875,929,592	51,134,408	97
2. Belanja Barang	3,895,285,000	3,639,992,934	(255,292,066)	93	1,965,043,000	1,936,162,940	28,880,060	99
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK 649688

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:59 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	9,509,119,000	8,907,722,929	(601,396,071)	94	3,892,107,000	3,812,092,532	80,014,468	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (649688) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:59 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	90,500,000	0	90,500,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	103,008	0	103,008	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(515)	0	(515)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	102,493	0	102,493	0.00
Persediaan	175,468,020	40,236,899	135,231,121	336.09
JUMLAH ASET LANCAR	266,070,513	40,236,899	225,833,614	561.26
ASET TETAP				
Tanah	8,330,878,900	8,330,878,900	0	0.00
Peralatan dan Mesin	7,885,558,401	4,354,849,636	3,530,708,765	81.08
Gedung dan Bangunan	4,566,738,645	1,881,671,150	2,685,067,495	142.70
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	30,500,000	(30,500,000)	(100.00)
Aset Tetap Lainnya	34,374,000	24,374,000	10,000,000	41.03
AKUMULASI PENYUSUTAN	(8,360,011,300)	(4,176,765,442)	(4,183,245,858)	100.16
JUMLAH ASET TETAP	12,457,538,646	10,445,508,244	2,012,030,402	19.26
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	18,150,000	(18,150,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(18,150,000)	18,150,000	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	12,723,609,159	10,485,745,143	2,237,864,016	21.34
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	15,363,783	78,114,050	(62,750,267)	(80.33)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,363,783	78,114,050	(62,750,267)	(80.33)
JUMLAH KEWAJIBAN	15,363,783	78,114,050	(62,750,267)	(80.33)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	12,708,245,376	10,407,631,093	2,300,614,283	22.11
JUMLAH EKUITAS	12,708,245,376	10,407,631,093	2,300,614,283	22.11
JUMLAH EKUITAS	12,708,245,376	10,407,631,093	2,300,614,283	22.11
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12,723,609,159	10,485,745,143	2,237,864,016	21.34

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (649688) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:59 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

Cilegon, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



IROMO, S.IP
NIP 196910311989031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (649688) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:59 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	90,500,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	103,008	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	515
0.0	117111	Barang Konsumsi	169,783,320	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5,321,200	0
0.0	117131	Bahan Baku	363,500	0
0.0	131111	Tanah	8,330,878,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,885,558,401	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,566,738,645	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	34,374,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,447,273,968
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	912,737,332
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	15,363,783
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	8,907,722,929
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	355,796,132	0
0.0	313211	Transfer Keluar	436,250	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,863,899,785
0.0	391111	Ekuitas	0	10,407,631,093
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	146,626,714	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,785,632
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	349,010,500
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,494,315,820	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21,749	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	114,790,600	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	34,124,540	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	19,620,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	117,845,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	11,104,891	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	81,762,180	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	204,488,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	24,760,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	230,173,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,351	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	19,173,020	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	6,224,458	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	19,553,400	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	51,776,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	15,045,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (649688) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:59 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512211	Beban Uang Lembur	192,420,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	33,997,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,241,969,905	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	285,460,623	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,171,250,898	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8,778,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,253,300	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	115,990,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	172,904,400	0
3.0	521211	Beban Bahan	55,521,800	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	187,543,839	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,163,910	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	31,980,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	450,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	47,500,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,700,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	826,644,800	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	340,230,450	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	335,020,770	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	109,156,700	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,650,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	200,311,712	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	118,321,887	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	203,141,997	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11,077,147	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	160,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	51,750,205	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	515	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	129,813,200	0
JUMLAH			30,910,425,537	30,910,425,537

Keterangan :

FINAL

Cilegon, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (649688) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:59 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	8,907,722,929
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	355,796,132	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,785,632
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	349,010,500
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,494,315,820	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21,789	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	114,790,600	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34,124,540	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	19,620,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	117,845,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	11,104,891	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	81,762,180	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	204,488,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	24,760,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	230,173,400	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,351	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	19,173,020	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,224,458	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	19,553,400	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	51,776,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	15,045,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	192,420,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	33,997,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,307,511,397	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	289,019,189	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,171,250,898	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8,778,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,253,300	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	115,990,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	172,904,400	0
3.0	521211	Belanja Bahan	55,521,800	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,961,100	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	137,039,750	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	180,923,738	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,537,228	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	31,980,000	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	450,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	138,000,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (649688) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:59 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,700,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	826,644,800	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	340,230,450	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	335,020,770	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	109,156,700	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,650,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	40
JUMLAH			9,263,519,101	9,263,519,101

Keterangan :

FINAL

Cilegon, 4 Mei 2026

Peranggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (649688) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:58 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	349,010,500	1,152,075,000	(803,064,500)	(69.706)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	349,010,500	1,152,075,000	(803,064,500)	(69.706)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	349,010,500	1,152,075,000	(803,064,500)	(69.706)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,198,629,937	1,944,926,642	3,253,703,295	167.292
Beban Persediaan	254,892,202	47,405,335	207,486,867	437.687
Beban Barang dan Jasa	2,624,680,947	1,371,934,490	1,252,746,457	91.312
Beban Pemeliharaan	686,488,367	290,782,350	395,706,017	136.083
Beban Perjalanan Dinas	110,806,700	231,823,650	(121,016,950)	(52.202)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (649688) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:58 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	318,633,599	285,476,874	33,156,725	11.615
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	515	0	515	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	9,194,132,267	4,172,349,341	5,021,782,926	120.359
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,845,121,767)	(3,020,274,341)	(5,824,847,426)	192.858
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	6,785,632	(2,860,782)	9,646,414	(337.195)
Pendapatan Pelepasan Aset	6,785,632	415,000	6,370,632	1,535.092
Beban Pelepasan Aset	0	3,275,782	(3,275,782)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(129,813,200)	0	(129,813,200)	()
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	129,813,200	0	129,813,200	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(123,027,568)	(2,860,782)	(120,166,786)	4,200.487
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,968,149,335)	(3,023,135,123)	(5,945,014,212)	196.651
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8,968,149,335)	(3,023,135,123)	(5,945,014,212)	196.651

Keterangan :

FINAL

Cilegon, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



IROMO, S.IP

NIP 196910311989031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (649688) STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 8:59 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	10,407,631,093	10,796,613,095	(388,982,002)	(3.6)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8,968,149,335)	(3,023,135,123)	(5,945,014,212)	196.65
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(146,626,714)	838	(146,627,552)	(17,497,321.2)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(146,626,714)	0	(146,626,714)	0
LAIN-LAIN	0	838	(838)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	11,415,390,332	2,634,152,283	8,781,238,049	333.36
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,300,614,283	(388,982,002)	2,689,596,285	(691.44)
EKUITAS AKHIR	12,708,245,376	10,407,631,093	2,300,614,283	22.11

Keterangan :

FINAL

Sitigon, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 649688
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 9:01 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,044,939,000	1,497,412,000	1,494,315,820	0	1,494,315,820	99.79	3,096,180
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38,000	54,000	21,789	40	21,749	40.28	32,251
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	196,460,000	116,930,000	114,790,600	0	114,790,600	98.17	2,139,400
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	62,131,000	39,460,000	34,124,540	0	34,124,540	86.48	5,335,460
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	18,206,000	21,860,000	19,620,000	0	19,620,000	89.75	2,240,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	216,839,000	134,405,000	117,845,000	0	117,845,000	87.68	16,560,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	16,978,000	21,243,000	11,104,891	0	11,104,891	52.28	10,138,109
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	133,587,000	101,443,000	81,762,180	0	81,762,180	80.6	19,680,820
511129	Belanja Uang Makan PNS	329,968,000	226,865,000	204,488,000	0	204,488,000	90.14	22,377,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,689,000	35,320,000	24,760,000	0	24,760,000	70.1	10,560,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,039,835,000	2,194,992,000	2,102,832,820	40	2,102,832,780	95.8	92,159,220
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40,023,000	305,353,000	230,173,400	0	230,173,400	75.38	75,179,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,000	9,000	4,351	0	4,351	48.34	4,649
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,002,000	35,859,000	19,173,020	0	19,173,020	53.47	16,685,980
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	813,000	15,573,000	6,224,458	0	6,224,458	39.97	9,348,542
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,608,000	23,506,000	19,553,400	0	19,553,400	83.18	3,952,600
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8,690,000	88,290,000	51,776,000	0	51,776,000	58.64	36,514,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,520,000	15,691,000	15,045,000	0	15,045,000	95.88	646,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	58,665,000	484,281,000	341,949,629	0	341,949,629	70.61	142,331,371
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	122,890,000	247,823,000	192,420,000	0	192,420,000	77.64	55,403,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	60,000,000	33,997,000	0	33,997,000	56.66	26,003,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	122,890,000	307,823,000	226,417,000	0	226,417,000	73.55	81,406,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,745,281,000	2,325,038,000	2,307,511,397	0	2,307,511,397	99.25	17,526,603
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	42,125,000	301,700,000	289,019,189	0	289,019,189	95.8	12,680,811
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	2,787,406,000	2,626,738,000	2,596,530,586	0	2,596,530,586	98.85	30,207,414
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	6,008,796,000	5,613,834,000	5,267,730,035	40	5,267,729,995	93.83	346,104,005
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,452,726,000	1,181,553,000	1,171,250,898	0	1,171,250,898	99.13	10,302,102

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 649688
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 9:01 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	8,778,000	8,778,000	0	8,778,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,600,000	1,600,000	1,253,300	0	1,253,300	78.33	346,700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	128,520,000	115,990,000	115,990,000	0	115,990,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	133,749,000	178,182,000	172,904,400	0	172,904,400	97.04	5,277,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,718,595,000	1,486,103,000	1,470,176,598	0	1,470,176,598	98.93	15,926,402
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	88,350,000	78,844,000	55,521,800	0	55,521,800	70.42	23,322,200
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	95,850,000	86,344,000	55,521,800	0	55,521,800	64.3	30,822,200
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,000,000	8,000,000	7,961,100	0	7,961,100	99.51	38,900
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	14,120,000	144,320,000	137,039,750	0	137,039,750	94.96	7,280,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	44,120,000	152,320,000	145,000,850	0	145,000,850	95.19	7,319,150
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	216,000,000	185,000,000	180,923,738	0	180,923,738	97.8	4,076,262
522112	Belanja Langganan Telepon	16,000,000	2,600,000	2,537,228	0	2,537,228	97.59	62,772
522113	Belanja Langganan Air	40,000,000	34,000,000	31,980,000	0	31,980,000	94.06	2,020,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,000,000	600,000	450,000	0	450,000	75	150,000
522141	Belanja Sewa	60,000,000	138,000,000	138,000,000	0	138,000,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	750,850,000	838,850,000	826,644,800	0	826,644,800	98.55	12,205,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,089,550,000	1,201,750,000	1,183,235,766	0	1,183,235,766	98.46	18,514,234
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	230,190,000	391,754,000	340,230,450	0	340,230,450	86.85	51,523,550
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	429,440,000	338,770,000	335,020,770	0	335,020,770	98.89	3,749,230
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	659,630,000	730,524,000	675,251,220	0	675,251,220	92.43	55,272,780
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	614,550,000	233,444,000	109,156,700	0	109,156,700	46.76	124,287,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,800,000	4,800,000	1,650,000	0	1,650,000	34.38	3,150,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	623,850,000	238,244,000	110,806,700	0	110,806,700	46.51	127,437,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,231,595,000	3,895,285,000	3,639,992,934	0	3,639,992,934	93.45	255,292,066
	JUMLAH BELANJA	10,240,391,000	9,509,119,000	8,907,722,969	40	8,907,722,929	93.68	601,396,071

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 649688
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 9:00 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,044,939,000	1,497,412,000	1,494,315,820	0	1,494,315,820	99.79	3,096,180
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38,000	54,000	21,789	40	21,749	40.28	32,251
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	196,460,000	116,930,000	114,790,600	0	114,790,600	98.17	2,139,400
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	62,131,000	39,460,000	34,124,540	0	34,124,540	86.48	5,335,460
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	18,206,000	21,860,000	19,620,000	0	19,620,000	89.75	2,240,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	216,839,000	134,405,000	117,845,000	0	117,845,000	87.68	16,560,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	16,978,000	21,243,000	11,104,891	0	11,104,891	52.28	10,138,109
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	133,587,000	101,443,000	81,762,180	0	81,762,180	80.6	19,680,820
511129	Belanja Uang Makan PNS	329,968,000	226,865,000	204,488,000	0	204,488,000	90.14	22,377,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,689,000	35,320,000	24,760,000	0	24,760,000	70.1	10,560,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,039,835,000	2,194,992,000	2,102,832,820	40	2,102,832,780	95.8	92,159,220
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40,023,000	305,353,000	230,173,400	0	230,173,400	75.38	75,179,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,000	9,000	4,351	0	4,351	48.34	4,649
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,002,000	35,859,000	19,173,020	0	19,173,020	53.47	16,685,980
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	813,000	15,573,000	6,224,458	0	6,224,458	39.97	9,348,542
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,608,000	23,506,000	19,553,400	0	19,553,400	83.18	3,952,600
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8,690,000	88,290,000	51,776,000	0	51,776,000	58.64	36,514,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,520,000	15,691,000	15,045,000	0	15,045,000	95.88	646,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	58,665,000	484,281,000	341,949,629	0	341,949,629	70.61	142,331,371
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	122,890,000	247,823,000	192,420,000	0	192,420,000	77.64	55,403,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	60,000,000	33,997,000	0	33,997,000	56.66	26,003,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	122,890,000	307,823,000	226,417,000	0	226,417,000	73.55	81,406,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,745,281,000	2,325,038,000	2,307,511,397	0	2,307,511,397	99.25	17,526,603
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	42,125,000	301,700,000	289,019,189	0	289,019,189	95.8	12,680,811
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	2,787,406,000	2,626,738,000	2,596,530,586	0	2,596,530,586	98.85	30,207,414
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	6,008,796,000	5,613,834,000	5,267,730,035	40	5,267,729,995	93.83	346,104,005
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,452,726,000	1,181,553,000	1,171,250,898	0	1,171,250,898	99.13	10,302,102

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 649688
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 9:00 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	8,778,000	8,778,000	0	8,778,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,600,000	1,600,000	1,253,300	0	1,253,300	78.33	346,700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	128,520,000	115,990,000	115,990,000	0	115,990,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	133,749,000	178,182,000	172,904,400	0	172,904,400	97.04	5,277,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,718,595,000	1,486,103,000	1,470,176,598	0	1,470,176,598	98.93	15,926,402
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	88,350,000	78,844,000	55,521,800	0	55,521,800	70.42	23,322,200
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	95,850,000	86,344,000	55,521,800	0	55,521,800	64.3	30,822,200
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,000,000	8,000,000	7,961,100	0	7,961,100	99.51	38,900
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	14,120,000	144,320,000	137,039,750	0	137,039,750	94.96	7,280,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	44,120,000	152,320,000	145,000,850	0	145,000,850	95.19	7,319,150
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	216,000,000	185,000,000	180,923,738	0	180,923,738	97.8	4,076,262
522112	Belanja Langganan Telepon	16,000,000	2,600,000	2,537,228	0	2,537,228	97.59	62,772
522113	Belanja Langganan Air	40,000,000	34,000,000	31,980,000	0	31,980,000	94.06	2,020,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,000,000	600,000	450,000	0	450,000	75	150,000
522141	Belanja Sewa	60,000,000	138,000,000	138,000,000	0	138,000,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	750,850,000	838,850,000	826,644,800	0	826,644,800	98.55	12,205,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,089,550,000	1,201,750,000	1,183,235,766	0	1,183,235,766	98.46	18,514,234
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	230,190,000	391,754,000	340,230,450	0	340,230,450	86.85	51,523,550
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	429,440,000	338,770,000	335,020,770	0	335,020,770	98.89	3,749,230
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	659,630,000	730,524,000	675,251,220	0	675,251,220	92.43	55,272,780
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	614,550,000	233,444,000	109,156,700	0	109,156,700	46.76	124,287,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,800,000	4,800,000	1,650,000	0	1,650,000	34.38	3,150,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	623,850,000	238,244,000	110,806,700	0	110,806,700	46.51	127,437,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,231,595,000	3,895,285,000	3,639,992,934	0	3,639,992,934	93.45	255,292,066
	JUMLAH BELANJA	10,240,391,000	9,509,119,000	8,907,722,969	40	8,907,722,929	93.68	601,396,071

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
SATUAN KERJA : 649688

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 04/05/26 9:00 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,044,939,000	1,497,412,000	1,494,315,820	0	1,494,315,820	99.79	3,096,180
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38,000	54,000	21,789	40	21,749	40.28	32,251
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	196,460,000	116,930,000	114,790,600	0	114,790,600	98.17	2,139,400
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	62,131,000	39,460,000	34,124,540	0	34,124,540	86.48	5,335,460
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	18,206,000	21,860,000	19,620,000	0	19,620,000	89.75	2,240,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	216,839,000	134,405,000	117,845,000	0	117,845,000	87.68	16,560,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	16,978,000	21,243,000	11,104,891	0	11,104,891	52.28	10,138,109
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	133,587,000	101,443,000	81,762,180	0	81,762,180	80.6	19,680,820
511129	Belanja Uang Makan PNS	329,968,000	226,865,000	204,488,000	0	204,488,000	90.14	22,377,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,689,000	35,320,000	24,760,000	0	24,760,000	70.1	10,560,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	40,023,000	305,353,000	230,173,400	0	230,173,400	75.38	75,179,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,000	9,000	4,351	0	4,351	48.34	4,649
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,002,000	35,859,000	19,173,020	0	19,173,020	53.47	16,685,980
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	813,000	15,573,000	6,224,458	0	6,224,458	39.97	9,348,542
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,608,000	23,506,000	19,553,400	0	19,553,400	83.18	3,952,600
511628	Belanja Uang Makan PPPK	8,690,000	88,290,000	51,776,000	0	51,776,000	58.64	36,514,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	2,520,000	15,691,000	15,045,000	0	15,045,000	95.88	646,000
512211	Belanja Uang Lembur	122,890,000	247,823,000	192,420,000	0	192,420,000	77.64	55,403,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	60,000,000	33,997,000	0	33,997,000	56.66	26,003,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,745,281,000	2,325,038,000	2,307,511,397	0	2,307,511,397	99.25	17,526,603
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	42,125,000	301,700,000	289,019,189	0	289,019,189	95.8	12,680,811
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	6,008,796,000	5,613,834,000	5,267,730,035	40	5,267,729,995	93.83	346,104,005
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,452,726,000	1,181,553,000	1,171,250,898	0	1,171,250,898	99.13	10,302,102
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	8,778,000	8,778,000	0	8,778,000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,600,000	1,600,000	1,253,300	0	1,253,300	78.33	346,700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	128,520,000	115,990,000	115,990,000	0	115,990,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	133,749,000	178,182,000	172,904,400	0	172,904,400	97.04	5,277,600
521211	Belanja Bahan	42,926,000	33,420,000	33,321,800	0	33,321,800	99.71	98,200
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,000,000	8,000,000	7,961,100	0	7,961,100	99.51	38,900
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	14,120,000	144,320,000	137,039,750	0	137,039,750	94.96	7,280,250
522111	Belanja Langganan Listrik	216,000,000	185,000,000	180,923,738	0	180,923,738	97.8	4,076,262
522112	Belanja Langganan Telepon	16,000,000	2,600,000	2,537,228	0	2,537,228	97.59	62,772
522113	Belanja Langganan Air	40,000,000	34,000,000	31,980,000	0	31,980,000	94.06	2,020,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,000,000	600,000	450,000	0	450,000	75	150,000
522141	Belanja Sewa	60,000,000	138,000,000	138,000,000	0	138,000,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	750,850,000	838,850,000	826,644,800	0	826,644,800	98.55	12,205,200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
SATUAN KERJA : 649688

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 04/05/26 9:00 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	230,190,000	391,754,000	340,230,450	0	340,230,450	86.85	51,523,550
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	429,440,000	338,770,000	335,020,770	0	335,020,770	98.89	3,749,230
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	490,910,000	109,804,000	109,156,700	0	109,156,700	99.41	647,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	1,800,000	1,650,000	0	1,650,000	91.67	150,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	4,052,031,000	3,715,721,000	3,617,792,934	0	3,617,792,934	97.36	97,928,066
	JUMLAH RUPIAH MURNI	10,060,827,000	9,329,555,000	8,885,522,969	40	8,885,522,929	95.24	444,032,071
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	45,424,000	45,424,000	22,200,000	0	22,200,000	48.87	23,224,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,500,000	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	123,640,000	123,640,000	0	0	0	0	123,640,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	179,564,000	179,564,000	22,200,000	0	22,200,000	12.36	157,364,000
	JUMLAH PNBP	179,564,000	179,564,000	22,200,000	0	22,200,000	12.36	157,364,000
	TOTAL	10,240,391,000	9,509,119,000	8,907,722,969	40	8,907,722,929	93.68	601,396,071

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 649688

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BANTEN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 04/05/26 9:00 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,785,632	0	6,785,632	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	6,785,632	0	6,785,632	
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	3,279,935,000	349,010,500	0	349,010,500	10.64
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	3,279,935,000	349,010,500	0	349,010,500	10.64
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	3,279,935,000	355,796,132	0	355,796,132	10.85
	JUMLAH PENDAPATAN	3,279,935,000	355,796,132	0	355,796,132	10.85

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 032

UAKPB : 649688

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tanggal : 04/05/26 9:04 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	34,039,049
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	6,037,850
117114	Suku Cadang	160,000
131111	Tanah	8,330,878,900
132111	Peralatan dan Mesin	4,354,849,636
133111	Gedung dan Bangunan	1,881,671,150
134113	Jaringan	30,500,000
135121	Aset Tetap Lainnya	24,374,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,856,579,606)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(305,444,174)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(14,741,662)
162151	Software	18,150,000
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(18,150,000)
J U M L A H		10,485,745,143

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
UAKPB : 649688 **STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN MERAK**

Tgl.Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl.Cetak : 04/05/26 9:04 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	169,783,320
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5,321,200
117131	Bahan Baku	363,500
131111	Tanah	8,330,878,900
132111	Peralatan dan Mesin	7,885,558,401
133111	Gedung dan Bangunan	4,566,738,645
135121	Aset Tetap Lainnya	34,374,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7,447,273,968)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(912,737,332)
J U M L A H		12,633,006,666



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 032
UAKPB : 649688

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:02 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_p

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		3,835	8,330,878,900	0	0	0	0	3,835	8,330,878,900
20101	TANAH PERSIL	-	3,835	8,330,878,900	0	0	0	0	3,835	8,330,878,900
132111	Peralatan dan Mesin		336	4,354,849,636	259	4,191,283,830	24	660,575,065	571	7,885,558,401
30103	ALAT BANTU	-	1	2,120,100	1	297,786,000	0	0	2	299,906,100
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	11	773,836,000	13	1,638,752,000	0	0	24	2,412,588,000
30303	ALAT UKUR	-	0	0	1	3,770,000	0	0	1	3,770,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	5	12,642,000	1	1,512,500	0	0	6	14,154,500
30501	ALAT KANTOR	-	35	185,044,498	24	99,285,200	0	0	59	284,329,698
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	149	465,928,350	100	467,799,050	3	45,413,995	246	888,313,405
30601	ALAT STUDIO	-	11	118,562,100	1	40,000,000	0	0	12	158,562,100
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	6	13,550,000	0	0	0	0	6	13,550,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	4	31,250,000	0	0	0	0	4	31,250,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	2	7,500,000	15	21,750,000	2	7,500,000	15	21,750,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	52	1,807,553,633	18	331,314,648	9	244,125,290	61	1,894,742,991
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	5	392,573,000	0	0	1	297,786,000	4	94,787,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	2	9,150,000	3	210,230,092	2	9,150,000	3	210,230,092
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	2	14,224,000	0	0	0	0	2	14,224,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	1	1,870,000	0	0	0	0	1	1,870,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	22	208,357,145	57	654,941,240	6	52,829,780	73	810,468,605
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	27	306,918,810	25	424,143,100	0	0	52	731,061,910
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	1	3,770,000	0	0	1	3,770,000	0	0
133111	Gedung dan Bangunan		4	1,881,671,150	1	3,862,443,740	2	1,177,376,245	3	4,566,738,645
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	3	1,833,959,150	0	1,219,215,240	2	1,177,376,245	1	1,875,798,145
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	0	0	1	2,643,228,500	0	0	1	2,643,228,500
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	47,712,000	0	0	0	0	1	47,712,000
134113	Jaringan		1	30,500,000	0	0	1	30,500,000	0	0
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-	1	30,500,000	0	0	1	30,500,000	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		13	24,374,000	1	10,000,000	0	0	14	34,374,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	11	24,104,500	0	0	0	0	11	24,104,500
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	0	0	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	2	269,500	0	0	0	0	2	269,500
TOTAL				14,622,273,686		8,063,727,570		1,868,451,310		20,817,549,946

CILEGON, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KEPALA SKIPM MERAK




IREMO, S.IP
196810311989031002

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 649688 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:02 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED							
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU	
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7		8=6+7	9=5-8	
132111	Peralatan dan Mesin		14	9,058,000	0	0	0	0	14	9,058,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	1	900,000	0	0	0	0	1	900,000
30501	ALAT KANTOR	-	4	3,800,000	0	0	0	0	4	3,800,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	8	3,948,000	0	0	0	0	8	3,948,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	410,000	0	0	0	0	1	410,000
TOTAL				9,058,000		0		0		9,058,000



**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 032
UAKPB : 649688

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tanggal : 04/05/26 9:02 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software		1	18,150,000	0	0	1	18,150,000	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	1	18,150,000	0	0	1	18,150,000	0	0
TOTAL				18,150,000		0		18,150,000		



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 032
UAKPB : 649688

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

Rode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		3,835	8,330,878,900	0	0	0	8,330,878,900
20101	TANAH PERSIL	-	3,835	8,330,878,900	0	0	0	8,330,878,900
132111	Peralatan dan Mesin		571	7,885,558,401	(3,856,579,606)	(3,590,694,362)	(7,447,273,968)	438,284,433
30103	ALAT BANTU	-	2	299,906,100	(605,744)	(298,088,872)	(298,694,616)	1,211,484
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	24	2,412,588,000	(773,836,000)	(1,638,752,000)	(2,412,588,000)	0
30303	ALAT UKUR	-	1	3,770,000	0	(3,770,000)	(3,770,000)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	6	14,154,500	(8,646,000)	(3,510,500)	(12,156,500)	1,998,000
30501	ALAT KANTOR	-	59	284,329,698	(176,296,498)	(102,897,200)	(279,193,698)	5,136,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	246	888,313,405	(402,935,850)	(370,570,945)	(773,506,795)	114,806,610
30601	ALAT STUDIO	-	12	158,562,100	(107,815,480)	(47,350,040)	(155,165,520)	3,396,580
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	6	13,550,000	(13,550,000)	0	(13,550,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	4	31,250,000	(19,887,500)	(3,125,000)	(23,012,500)	8,237,500
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	15	21,750,000	(7,500,000)	(14,250,000)	(21,750,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	61	1,894,742,991	(1,607,722,676)	(150,237,194)	(1,757,959,870)	136,783,121
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	4	94,787,000	(220,173,903)	162,561,267	(57,612,636)	37,174,364
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	3	210,230,092	(3,355,000)	(143,551,068)	(146,906,068)	63,324,024
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	2	14,224,000	(14,224,000)	0	(14,224,000)	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	1	1,870,000	(935,000)	(187,000)	(1,122,000)	748,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	73	810,468,605	(193,357,145)	(568,385,210)	(761,742,355)	48,726,250
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	52	731,061,910	(301,968,810)	(412,350,600)	(714,319,410)	16,742,500
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	0	0	(3,770,000)	3,770,000	0	0
133111	Gedung dan Bangunan		3	4,566,738,645	(305,444,174)	(607,293,158)	(912,737,332)	3,654,001,313
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	1	1,875,798,145	(296,924,174)	(80,092,820)	(377,016,994)	1,498,781,151
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	1	2,643,228,500	0	(526,064,338)	(526,064,338)	2,117,164,162
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	47,712,000	(8,520,000)	(1,136,000)	(9,656,000)	38,056,000
134113	Jaringan		0	0	(14,741,662)	14,741,662	0	0
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-	0	0	(14,741,662)	14,741,662	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		14	34,374,000	0	0	0	34,374,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	11	24,104,500	0	0	0	24,104,500
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	1	10,000,000	0	0	0	10,000,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	2	269,500	0	0	0	269,500
JUMLAH			4,423	20,817,549,946	(4,176,765,442)	(4,183,245,858)	(8,360,011,300)	12,457,538,646

CILEGON, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPB

KEPALA SKIPM MERAK



IBOMO, S.IP

196910311969031002

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 649688 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		14	9,058,000	(6,193,000)	(842,000)	(7,035,000)	2,023,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	1	900,000	(900,000)	0	(900,000)	0
30501	ALAT KANTOR	-	4	3,800,000	(1,140,000)	(760,000)	(1,900,000)	1,900,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	8	3,948,000	(3,948,000)	0	(3,948,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	1	410,000	(205,000)	(82,000)	(287,000)	123,000
JUMLAH			14	9,058,000	(6,193,000)	(842,000)	(7,035,000)	2,023,000



**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAKPB : 649688 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
Tanggal : 04/05/26 9:03 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker_

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		0	0	(18,150,000)	18,150,000	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	0	0	(18,150,000)	18,150,000	0	0
JUMLAH			0	0	(18,150,000)	18,150,000	0	0

CILEGON, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KEPALA SKIRM MERAK
IROMO, S.IP
196910311989031002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II MERAK

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER satker : 649688

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)						GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti	Action			
									Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini										Catatan	Validasi		
														RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO												TPCRO (%)	PCRO (%)
1	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	EC	3989	BIA001	Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya	5,000,000	0	0.00	1	Produk	1.00	8.34	100.00	1.0000	1.00	100.00	100.00	01	Non PN	-		00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
2	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	EC	3989	PDC002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	62,128,000	31,953,000	51.43	257	produk	2.00	16.67	53.00	257.0000	257.00	100.00	48.57	01	PN	-		00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
3	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	EC	3989	PDF002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	25,440,000	25,059,000	98.50	22	Lembaga	2.00	16.67	11.50	22.0000	22.00	100.00	1.50	00	PN	-		00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
4	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	EC	3989	QIA001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	25,000,000	0	0.00	1	Produk	1.00	8.34	95.00	1.0000	1.00	100.00	100.00	01	PN	-		00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
5	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	EC	3989	QIC002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	25,000,000	0	0.00	20	Lembaga	3.00	16.67	70.00	20.0000	20.00	100.00	100.00	01	PN	-		00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
6	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	EC	7010	ABR001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8,000,000	0	0.00	1	RekomendasiKebijakan	1.00	8.34	90.00	1.0000	1.00	100.00	100.00	01	Non PN	-		00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II MERAK**

7	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	EC	7010	DCC001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	7,000,000	0	0.00	1	Kegiatan	1.00	16.67	100.00	1.0000	1.00	100.00	100.00	01	Non PN	-	00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
8	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	EC	7010	PBR001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	192,170,000	179,586,650	93.45	1	RekomendasiKebijakan	1.00	16.67	52.00	1.0000	1.00	100.00	6.55	02	PN	-	00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
9	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	EC	7010	PDD001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	25,000,000	22,200,000	88.80	1	Lembaga	1.00	16.67	70.00	1.0000	1.00	100.00	11.20	01	PN	-	00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
10	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	EC	7010	PDD002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	32,120,000	26,890,000	83.72	1	Lembaga	1.00	16.67	13.00	1.0000	1.00	100.00	16.28	01	PN	-	00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
11	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	EC	7010	QIA001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar sistem dan regulasi	7,000,000	0	0.00	1	Produk	1.00	16.67	100.00	1.0000	1.00	100.00	100.00	01	PN	-	00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
12	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	WA	3987	EBA962	Layanan Umum	57,296,000	45,997,300	80.28	1	Layanan	1.00	8.37	7.01	1.0000	1.00	100.00	19.72	00	Non PN	-	00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
13	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	WA	3987	EBA994	Layanan Perkantoran	8,958,161,000	8,532,846,819	95.25	1	Layanan	1.00	8.37	8.36	1.0000	1.00	100.00	4.75	00	Non PN	-	00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II MERAK

14	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	WA	3987	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	43,200,000	43,190,200	99.98	1	Dokumen	1.00	8.34	5.50	1.0000	1.00	100.00	0.02	00	Non PN	-		00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-
15	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	03213	12	WA	3987	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	36,604,000	0	0.00	1	Dokumen	1.00	8.34	80.00	1.0000	1.00	100.00	100.00	01	Non PN	-		00 - Data Valid		05-JAN-26	05-JAN-26	Lihat catatan	-

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (649688) Stasiun KIPM Merak
Kode dan Nama UAPPAW : (2900) Propinsi Banten
Kode dan Nama Eselon 1 : (13) BPPMHKP
Kode dan Nama K/L : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Terdapat ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATD per tanggal pelaporan (jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat pendapatan belum terditeksi secara riil per tanggal pelaporan dan belum dilakukan Revisi dan Ditunga		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

		Ada	Tidak	Seharusnya
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)			
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah Saldo tidak Normal? (jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xxx hingga 1113xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di LK hanya Akun dan 1116xxx)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114115, 401/ Belanja Hibah/ Utang/ Lain-lain yang Masih Harus Dibayar (perseid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak

9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		N/A	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	N/A		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	-2.863.463.535		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		N/A	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?		N/A	Ya

	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		N/A	Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	✓		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	✓		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	✓		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		✓	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	✓		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	✓		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	✓		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		N/A	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?		N/A	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?		N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"				

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,


(Iromo, S.IP)
NIP. 19691031 198903 1002

Cilegon, 10 Januari 2026
Penelaah,


(Laeisa Asgor)
NIP. 19820928 201503 1001

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BPPMHKP
WILAYAH : 02900 KANTOR DAERAH
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649688 STASIUN KIPM MERAK
NO DOKUMEN : 005
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2025 / SEMESTER II TA 2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☒ | Belanja Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☐ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	114112	Belanja Barang dibayar dimuka	60.500.000	
2	K	522141	Belanja Sewa		60.500.000

Keterangan :

Merupakan Belanja Sewa 1 Unit Mesin Photo Copy atas BBKIPM Jakarta I dengan CV. Jaya Mulia sejahtera, Jakarta selama 1 tahun mulai tanggal 01 Desember 2025 - 30 November 2026 sebesar Rp 66.000.000 yang telah dibayarkan 100% dengan nomor SP2D 259991330437461, tanggal 03 Desember 2025

Perhitungan Sewa selama 1 tahun adalah sebagai berikut :

a. Rp 66.000.000 : 12 bulan = Rp 5.500.000/ bulan

b. Pencatatan Belanja Barang dibayar dimuka sisa 11 bulan (Januari - Nopember 2026) sebesar Rp 60.500.000

Tanggal 31 Desember 2025

Dibuat oleh:

Nita Andriyani, A.Md



Disetujui oleh:

Womo, S.P

Direkam oleh:

Laeisa Asgor

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kelautan Dan Perikanan
 Eselon I : Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Hasil Perikanan
 Wilayah : Banten
 Satuan Kerja : Stasiun KIPM Merak
 No. Dokumen : 004
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Akrual Belanja Barang yang dibayar dimuka (Sewa Rumah Arsip)

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima Di Muka ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima ☒ Belanja Dibayar Dimuka ☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar ☐ Penyisihan Piutang ☐ Penghapusan Piutang ☐ Penyusutan Aset ☐ Kas di Bendahara Penerimaan ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran ☐ Persediaan	☐ Koreksi Antar Beban ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi ☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi ☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang ☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek ☐ Transfer Masuk ☐ Transfer Keluar ☐ Reklasifikasi Neraca ☐ Koreksi
---	--

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Debet
1	D	114112	Belanja Barang yang dibayar di muka (prepaid)	30.000.000	-
2	K	522141	Belanja Sewa	-	30.000.000

Merupakan Belanja Sewa atas Rumah Arsip Stasiun KIPM Merak dengan Ibu Teti Hartati di Kota Cilegon selama 1 Tahun mulai 01 Januari 2026 - 31 Desember 2026 sebesar Rp. 30.000.000 yang dibayarkan pada bulan Desember 2025
 Perhitungan Sewa selama 1 Tahun sebagai berikut :
 a. $Rp. 30.000.000 / 12 \text{ Bulan} = Rp. 2.500.000 / \text{Bulan}$
 b. Pencatatan Belanja Barang dibayar dimuka selama 12 Bulan (Januari 2026 s.d Desember 2026) sebesar Rp. 30.000.000

Tanggal : 31 Desember 2025

Dibuat oleh :



Nita Andriyani, A,Md



Disetujui oleh :

Iromo, S.IP

Dieksekusi oleh :



Laeisa Asgor

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Eselon I : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Wilayah : Hasil Kelautan dan Perikanan
Satuan Kerja : Banten
No. Dokumen : Stasiun KIPM Merak
Tanggal : 001
Tahun Anggaran : 31 Desember 2025
Keterangan : 2025
Keterangan : Tagihan Listrik bulan Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| ☐ Pendapatan Diterima Di Muka | ☐ Koreksi Antar Beban |
| ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| ☐ Belanja Dibayar Dimuka | ☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| ☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar | ☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| ☐ Penyisihan Piutang | ☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| ☐ Penghapusan Piutang | ☐ Transfer Masuk |
| ☐ Penyusutan Aset | ☐ Transfer Keluar |
| ☐ Kas di Bendahara Penerimaan | ☐ Reklasifikasi Neraca |
| ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran | ☐ Koreksi |
| ☐ Persediaan | |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Langganan Listrik Desember 2025	6.978.684	-
2	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	6.978.684

Tanggal : 31 Desember 2025

Dibuat oleh :

Nita Andriyani, A.Md



Disetujui oleh :

Iromo, S.IP

Direksi oleh :

Laeisa Asgor

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BPPMHKP
WILAYAH : 02900 KANTOR DAERAH
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649688 STASIUN KIPM MERAK
NO DOKUMEN : 002
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2025 / SEMESTER II TA 2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|--|
| 1 | ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 | ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 | ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 | ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 | ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 | ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 | ☒ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 | ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 | ☐ | Penyisihan Piutang | 15 | ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 | ☐ | Penghapusan Piutang | 16 | ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 | ☐ | Penyusutan | 17 | ☐ | Transfer Masuk |
| 8 | ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 | ☐ | Transfer Keluar |
| 9 | ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 | ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 | ☐ | Persediaan | 20 | ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	8.272.717	
2	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		8.272.717

URAIAN PENYESUAIAN

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR (BEBAN LANGGANAN LISTRIK 2025)

Tanggal 31 Desember 2025
Dibuat oleh:

Nita Andriyani, A.Md



Disetujui oleh:

Iromono, S.IP

Direkam oleh:

Laeisa Asyur

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BPPMHKP
WILAYAH : 02900 KANTOR DAERAH
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649688 STASIUN KIPM MERAK
NO DOKUMEN : 006
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2025 / SEMESTER II TA 2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☐ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	115212	Piutang Lainnya	54.842	
2	K	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)		54.842

URAIAN PENYESUAIAN

Piutang Lainnya pada Potongan Tukin PNS Bulan Desember 2025

Tanggal 31 Desember 2025
Dibuat oleh:

Nita Andriyani, A.Md



Disetujui oleh:

Iromo, S.IP

Direkam oleh:

Laeisa Asgor

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BPPMHKP
WILAYAH : 02900 KANTOR DAERAH
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 649688 STASIUN KIPM MERAK
NO DOKUMEN : 007
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2025 / SEMESTER II TA 2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☐ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☐ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	115212	Piutang Lainnya	48.166	
2	K	512414	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PPPK		48.166

URAIAN PENYESUAIAN

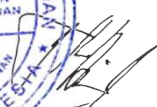
Piutang Lainnya pada Potongan Tukin PPPK Bulan Desember 2025

Tanggal 31 Desember 2025
Dibuat oleh:


Nita Andriyani, A.Md



Disetujui oleh:


Irom, S.IP

Direkam oleh:


Laeisa Asgor

MEMO PENYESUAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ESELON I : 03213 BPPMHKP
WILAYAH : 02951 KANTOR DAERAH
KODE / URAIAN SATUAN KERJA : 427520 STASIUN KIPM MERAK
NO DOKUMEN : 008
TANGGAL/ PERIODE : 31 DESEMBER 2025 / SEMESTER II TA 2025
TAHUN ANGGARAN : 2025

KATEGORI PENYESUAIAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 ☐ | Pendapatan Diterima Dimuka | 11 ☐ | Koreksi Antar Beban |
| 2 ☐ | Pendapatan yang Masih Harus Diterima | 12 ☐ | Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 3 ☐ | Beban Dibayar Dimuka | 13 ☐ | Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi |
| 4 ☐ | Beban yang Masih Harus Dibayar | 14 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| 5 ☒ | Penyisihan Piutang | 15 ☐ | Pelepasan Aset Tetap |
| 6 ☐ | Penghapusan Piutang | 16 ☐ | Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| 7 ☐ | Penyusutan | 17 ☐ | Transfer Masuk |
| 8 ☐ | Kas Di Bandahara Penerimaan | 18 ☐ | Transfer Keluar |
| 9 ☐ | Kas Lainnya Di Bandahara Pengeluaran | 19 ☐ | Reklasifikasi Neraca |
| 10 ☐ | Persediaan | 20 ☐ | Penyesuaian Lainnya |

PENYESUAIAN

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	515	
2	K	116212	Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Lainnya		515

URAIAN PENYESUAIAN

Penyisihan Piutang terhadap Potongan Tukin Bulan Desember 2025

Tanggal 31 Desember 2025
Dibuat oleh:

Nita Andriyani, A.Md



Disetujui oleh:

Iromono, S.P

Direkam oleh:

Laeisa Asgor

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Eselon I : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Wilayah : Hasil Kelautan dan Perikanan
Satuan Kerja : Banten
No. Dokumen : Stasiun KIPM Merak
Tanggal : 003
Tahun Anggaran : 31 Desember 2025
Keterangan : 2025
Keterangan : Tagihan Telepon bulan Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| ☐ Pendapatan Diterima Di Muka | ☐ Koreksi Antar Beban |
| ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| ☐ Belanja Dibayar Dimuka | ☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| ☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar | ☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| ☐ Penyisihan Piutang | ☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| ☐ Penghapusan Piutang | ☐ Transfer Masuk |
| ☐ Penyusutan Aset | ☐ Transfer Keluar |
| ☐ Kas di Bendahara Penerimaan | ☐ Reklasifikasi Neraca |
| ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran | ☐ Koreksi |
| ☐ Persediaan | |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Langganan Telepon Desember 2025	112.382	-
2	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	112.382

Tanggal : 31 Desember 2025
Dibuat oleh :

Nita Andriyani, A.Md



Disetujui oleh :

homo, S.IP

Direkan oleh :

Laeisa Asgor